

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENATAAN RUANG KAWASAN WISATA BAHARI DI
KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON**

Sitti Fatimah
Staf Pengajar Jurusan Teknik PWK, UIN Alauddin Makassar
sitti_fatimahuin@yahoo.com

ABSTRAK

Perlunya pelibatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pemanfaatan ruang. Sehingga pola pemanfaatan ruang yang di tetapkan tersebut dapat menghindari timbulnya masalah terutama perampasan hak masyarakat dalam kebebasan memanfaatkan ruang. Dengan memperhatikan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi dasar dan faktor utama yang menjadi pertanyaan dalam studi ini adalah: "Mengidentifikasi tingkat peran serta masyarakat dalam penataa nruang kawasan wisata bahari". Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan cara menghitung, membandingkan beberapa data yang menggunakan pendekatan nmatematis. Penelitian ini mengambil sampel kepala keluarga yang bermukim di desa Latuhalat dan desa Nusaniwe yang berada di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, quisioner dant elaah pustaka. Untuk mengolah data tersebut digunakan Tools atau alat analisis yaitu analisis kuantitatif denga menghitung, membandingkan danrumus yang digunakanya itu rumus Chi Kuadrat /Chi Square, analisis swot untuk melihat kekuatan, peluang, kelemahan, dana ncaman berdasarkan hasil analisis Chi Square. Hasil dari proses analisis yang dilakukan diketahui tingkat peran serta masyarakat dalam penataa nruang kawasan wisata bahari memiliki tingkat pengaruh yang "kuat dan sedang" dan berdasarkan matriks SWOT diketahui bahwa posisi peran serta masyarakatd alam penanataan ruang kawasan wisata bahari pada saat ini berada di kuadran III, yaitu kuadran Strategi penciutan/defensive (Retrenchment). Berdasarkan hasil analisis maka perlu di lakukan strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam hal penataan ruang kawasan wisata bahari kearah yang lebih baik.

Kata kunci : *peran serta, masyarakat, wisata*

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan masyarakat ataupun suatu negara. Salah satunya pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan serta membentuk moral suatu bangsa. Dengan ada pendidikan, suatu manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu.

Provinsi Maluku merupakan daerah yang kaya akan sumberdaya alam tetapi belum dipergunakan sebaik mungkin sehingga masih ketinggalan dengan daerah lain untuk itu potensi yang ada perlu digali dan di tumbuh kembangkan. Agar kemampuan tersebut dapat terwujud maka kehidupan di segala bidang perlu pengelolaan secara baik, begitu juga dengan bidang kepariwisataan telah membuat suatu arah kebijakan bagi pengembangan pariwisata agar pengembangan di masa yang akan datang dapat terwujud sesuai arahan kebijakan untuk itu potensi yang ada perlu dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat menunjang pembangunan daerah.

Pariwisata di Maluku mempunyai potensi yang dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata, disamping karena didukung oleh potensi pariwisata disetiap

Sitti Fatimah, Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

kabupaten/kota. Ini dapat dilihat dengan banyaknya potensi pariwisata yang ada, diantaranya di Kota Ambon yang menawarkan wisata bahari sepanjang pesisir pantai.

Kota Ambon dikenal sebagai salah satu kota dengan gugusan pulau yang memberikan karakteristik khas karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan, perbukitan, pesisir pantai, dan kelautan. Karakteristik ini memberikan peluang adanya banyak potensi alam yang dapat dijadikan sebagai objek wisata, terutama wisata bahari termasuk potensi wisata bawah laut, karena daerah dengan luas wilayah lautnya besar tentu menyimpan sejuta kekayaan alam.

Dengan ditetapkannya kawasan wisata bahari Kota Ambon dalam RTRW Kota Ambon tahun 2011-2031 tentang rencana kawasan pariwisata yang mencakup Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Leitimur Selatan dan Kecamatan Teluk Ambon, sudah saatnya pariwisata Kota Ambon kembali bangkit dengan berbagai potensi yang dimilikinya dengan banyak dilakukan pengembangan wisata dan banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal karena terdapat hamparan pasir putih di sepanjang pantai Kota Ambon serta memiliki pesona bawah air yang menawan.

Dalam upaya untuk melaksanakan program pembangunan pariwisata, pemerintah Kota Ambon berusaha meningkatkan citra positif dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya atau potensi pariwisata yang dimilikinya. Selain upaya pembangunan obyek dan daya tarik wisata dan kegiatan promosi, diperlukan pula fasilitas pelayanan wisatawan diantaranya sarana transportasi, akomodasi yang nyaman, keamanan serta hal lain yang dianggap perlu untuk menunjang program pengembangan pariwisata.

Daya tarik wisata bahari di kawasan pesisir Kecamatan Nusaniwe, merupakan anugerah yang dimiliki Kota Ambon yang tidak semua daerah di Indonesia memiliki kekayaan alam yang indah seperti ini, demikian keragaman flora dan fauna dengan potensi yang demikian sempurna.

Pantai Namalatu merupakan salah satu tujuan wisata bahari yang paling sering dikunjungi karena terkenal dengan keindahan alam pesisir pantai. Dengan jarak tempuh sekitar 30 menit dari pusat Kota Ambon, wisata pantai yang terletak di desa Latuhalat ini merupakan kawasan yang relatif mudah dijangkau. Pantai yang berpasir putih dengan karang-karang yang berwarna coklat gelap yang terlihat bila pasang surut menghiasi laut yang biru bening. Dibalik karang tersebut terdapat kehidupan bawah laut yang indah dengan berjenis ikan, penyu, dan biota laut. Pantai Namalatu ini masih aman dari pengaruh polusi dan memiliki taman laut yang indah sehingga lokasi ini sangat nyaman untuk olah raga pantai, berenang, snorkeling, memancing, dan menyelam.

Pengembangan pariwisata di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon termasuk Wisata Bahari, Pantai Namalatu dan Pantai Pintu Kota agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan strategi yang terencana dan sistematis bagi masyarakat local. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat local menjadi penting pula termasuk dalam kaitannya dengan upaya keberlanjutan pariwisata itu sendiri, yang mencakup perlindungan terhadap lingkungan maupun manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadi factor utama dalam prespektif pengembangan pariwisata daerah.

Paradigma baru penataan ruang kawasan objek wisata saat ini, adalah pelibatan peran serta masyarakat dalam pengaturan dan pemanfaatan ruang. Sehingga pola pemanfaatan ruang yang di tetapkan tersebut dapat menghindari timbulnya masalah terutama perampasan hak masyarakat dalam kebebasan memanfaatkan ruang.

Ketentuan mengenai keterlibatan masyarakat sebenarnya telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Sitti Fatimah, Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

pada Bab VIII Pasal 60 s/d 66 yang menjelaskan “setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pelibatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang”. Penguatan peran serta masyarakat yang telah ada tersebut, seharusnya dapat menjadi landasan yang kuat untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang kerap terjadi akibat produk suatu rencana tata ruang di daerah pesisir.

Pengembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata harus didasarkan pada perencanaan, pengembangan, dan arah pengelolaan yang jelas agar semua potensi yang dimiliki suatu daerah tujuan wisata dapat diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pengembangan pariwisata tidak hanya didukung oleh satu pihak tetapi merupakan kerjasama dari berbagai pihak, baik kalangan pengusaha (swasta), tokoh masyarakat maupun pihak pemerintah daerah. Berangkat dari uraian singkat di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon”.

Penelitian tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan wisata bahari yang ditinjau dari aspek pendidikan, tingkat pendapatan, status tempat tinggal, serta sosialisasi perdan pariwisata Kota Ambon dan mengetahui strategi penataan ruang kawasan wisata bahari di Kecamatan Nusaniwe yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nusaniwe dengan pertimbangan sebagai berikut, kedudukan wilayah kecamatan yang menjadi pusat pengembangan pariwisata yang menjadi lokasi pengambilan data adalah Desa Latuhalat dan Desa Nusaniwe dengan jumlah penduduk, Desa Latuhalat 8.886 jiwa dan Desa Nusaniwe 3.032 jiwa di Kecamatan Nusaniwe. Waktu penelitian dilakukan pertengahan bulan Januari – Februari 2014 dan disesuaikan berdasarkan data yang diperlukan.

2. Jenis dan Sumber Data

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner atau wawancara langsung di lapangan seperti. Data karakteristik masyarakat pesisir kecamatan nusaniwe yang meliputi tingkat pemahaman terhadap penataan ruang kawasan wisata bahari, tanggapan terhadap Perda Pariwisata Kota Ambon dan produk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh melalui instansi-instansi terkait seperti Kantor BPS, LSM, Kantor Kecamatan Nusaniwe, Kantor Kelurahan/Desa, Dinas Pariwisata Kota Ambon, Dinas Tata Ruang Kota Ambon dan BAPPEDA Kota Ambon, baik dalam bentuk tabulasi maupun deskriptif, Jenis data yang dimaksud ialah data peraturan daerah terkait pengembangan pariwisata di Kota Ambon dan data pendukung lainnya dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung ditujukan kepada objek yang menjadi sasaran penelitian, gunanya untuk

Sitti Fatimah, Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

- memahami kondisi dan potensi objektersebut yang dapat dikembangkan (data primer).
- b. Interview/Wawancara
Metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung terhadap beberapa orang informan yang dianggap layak dapat memberikan informasi mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Informan yang diwawancarai yaitu :
 - Aparat Dinas Pariwisata Kota Ambon 2 orang
 - Aparat Bappeda Kota Ambon 2 orang
 - Aparat Dinas Tata Ruang Kota Ambon 2 orang
 - Aparat kecamatan dan kelurahan masing-masing 1 orang.
 - c. Quisioner/Angket
Penyebaran angket atau kuisisioner (daftar Pertanyaan) yang dilakukan langsung terhadap objek penelitian.
 - d. Telaah Pustaka
Adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan jalan membaca atau mengambil literatur, laporan, seminar, dan sebagainya.
- 4. Populasi dan Sampel**
Sampel dalam penelitian ini adalah sampel wilayah, dimana penentuannya diambil dengan teknik Cluster yaitu cara yang dipergunakan untuk menarik sampel wilayah (kelurahan/desa) dan teknik yang dipakai adalah *Judgment Sampling* (sampling pertimbangan). Berdasarkan beberapa pertimbangan pemilihan lokasi seperti yang telah diuraikan di atas, dengan demikian maka dari 8 kelurahan dan 5 desa yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Nusaniwe ditetapkan Desa Latuhalat dan Desa Nusaniwe yang dijadikan lokasi pengambilan data. Sampel yang diambil sebesar 10% dari jumlah Kepala Keluarga (KK) pada kelurahan/desa terpilih. Rincian distribusi jumlah penduduk (KK) responden pada kelurahan terpilih yaitu : $10 / 100 \times \text{KK} = \text{Jumlah Responden}$ (Sugiarto dkk ,2001 : 10). Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah total dari 10% jumlah Kepala Keluarga dari kelurahan/desa dan dari jumlah tersebut diharapkan menjadi sampel yang dapat mewakili masyarakat Kecamatan Nusaniwe. Berikut ini distribusi sampel kelurahan/desa yang menjadi lokasi pengambilan data dalam penelitian ini :
(Desa Latuhalat = $10\% / 100 \times 1.334 = 133.4$ Responden)
(Desa Nusaniwe = $10\% / 100 \times 488 = 48.8$ Responden). Jadi jumlah responden secara keseluruhan dari kedua desa yang diambil adalah 182 KK, responden.
- 5. Metode Analisis**
- a. Berdasarkan rumusan masalah yang pertama maka analisis yang dipakai yaitu analisis dengan pendekatan kuantitatif dengan menghitung, membandingkan beberapa data yang menggunakan pendekatan matematis. Untuk tujuan tersebut, maka rumus yang digunakan yaitu rumus Chi-Kuadrat /Chi Square (Abustan,1996) sebagai berikut;

$$X^2 = \sum \frac{(f_0 - f_h)^2}{f_h}$$

Dimana .

Sitti Fatimah, Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

- X^2 = Chi-Kuadrat
- f_o = Frekuensi Observasi
- f_h = Frekuensi Harapan

Selanjutnya untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel X dengan variabel Y digunakan koefisien kontigensi dengan rumus :

$$C = \frac{\sqrt{X^2}}{X^2 + n}$$

- C = Koefisien kontigensi
- X^2 = Hasil perhitungan uji Chi Kuadrat
- n = Jumlah responden

Dengan konversi kualitatif nilai Indeks Kuatnya Hubungan (IKH) sebagai berikut:

Nilai IKH	Sebutan
0,80 – 1,00	Hubungan sangat kuat
0,60 – 0,79	Hubungan kuat
0,40 – 0,59	Hubungan sedang
0,20 – 0,39	Hubungan lemah
0,00 – 0,19	Hubungan sangat lemah

- b. Berdasarkan rumusan masalah yang kedua maka analisis yang dipakai adalah analisis swot: analisis yang memaparkan tentang strategi yang dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan wisata bahari.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Ambon merupakan Ibu Kota Provinsi Maluku dengan luas keseluruhan wilayah adalah 163.402 Ha dengan garis pantai sepanjang 120,96 Km. Luas areal laut Kota Ambon adalah 132.471 Ha (81,07 %). Secara administrasi Kota Ambon dengan luas wilayah daratan sebesar 35.944,52 Ha yang membujur di sepanjang pantai mengelilingi perairan Teluk Ambon dan Teluk Baguala di Pulau Ambon, secara administrasi wilayah Kota Ambon saat ini terbagi dalam 5 (lima) wilayah administrasi Kecamatan berdasar pada perda Kota Ambon No. 2 Tahun 2006, yaitu: Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Leitimur Selatan, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kecamatan Teluk Ambon serta meliputi 20 kelurahan dan 30 desa. Pada gambar 1 berikut dapat dilihat peta batas wilayah administrasi Pulau Ambon Provinsi Maluku. Secara geografis wilayah Kota Ambon terletak pada posisi geografis 03⁰ sampai 04⁰ Lintang Selatan (LS) dan 128⁰ sampai 129⁰ Bujur Timur (BT). Adapun batas-batas wilayah Kota Ambon, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah

Sitti Fatimah, Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

Kota Ambon merupakan bagian dari Kepulauan Maluku yang merupakan pulau-pulau vulkanis, sehingga secara umum Kota Ambon memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit dan berlereng terjal. Sebesar 73 % dari luas wilayahnya dapat dikategorikan berlereng terjal, dengan kemiringan diatas 20 %. Hanya 17 % dari wilayah daratannya yang dapat diklasifikasikan datar atau landai dengan kemiringan kurang dari 20 %. Keadaan topografi Kota Ambon secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. (1) Topografi relatif datar dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 0-10% terdapat di kawasan sepanjang pantai dengan radius antara 0-300 meter dari garis pantai. (2) Topografi landai sampai miring dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 10-20% terdapat pada kawasan yang lebih jauh dari garis pantai, 100 meter kearah daratan. (3) Topografi bergelombang dan berbukit terjal dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 20-30% terdapat pada kawasan perbukitan. (4) Topografi terjal dengan ketinggian > 100 meter dan kemiringan > 30% terdapat pada kawasan pegunungan.

Sebagai kota yang berada di pesisir pantai, Kota Ambon berkembang sama seperti pada umumnya kota pantai yang dimulai dari kawasan pesisir terutama pada kawasan-kawasan yang berada disekitar pelabuhan-pelabuhan utama, kemudian merambah wilayah daratan yang selanjutnya meluas sampai kewilayah perbukitan. Dengan kondisi perkembangan seperti itu, tingkat kepadatan bangunan di kawasan pesisir pantai pada umumnya menjadi sangat padat dan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan penggunaan lahan yang begitu cepat.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan kota yang berasal dari adanya aktivitas kelautan serta kondisi geografis yang menunjukkan Kota Ambon yang berada di Pulau Ambon merupakan salah satu bagian dari gugusan kepulauan yang ada di wilayah Provinsi Maluku, maka dengan sendirinya orientasi aktivitas masyarakat akan banyak berhubungan dengan kawasan pesisir pantai. Kondisi saat ini menunjukkan, kawasan sekitar pelabuhan laut utama di Kota Ambon telah berkembang dengan sangat pesat dan membentuk pusat Kota Ambon. Akibatnya bertumpuknya segala aktivitas kota disekitar kawasan pusat kota terutama aktivitas perdagangan dan jasa yang kemudian berimbas pada tingkat kepadatan bangunan dan penduduk menjadi sangat tinggi.

2. Sosialisasi Perda Pariwisata Kota Amabon

Penjabaran dari hasil penelitian dilapangan untuk mengetahui sejauhmana informas perda yang diperoleh masyarakat, maka dari 182 responden terdapat 136 (74,7%) yang mengatakan telah memperoleh informasi perda tersebut, selanjutnya 46 (25,3%) belum memperoleh informasi tersebut. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Distribusi Responden Menurut Sosialisasi Perda

Intensitas Perolehan	Frekuensi	Persentase
Informasi > 3 kali	85	46.7
Informasi 1-2 kali	51	28.0
Belum pernah	46	25.3
Jumlah	182	100

Sumber : Hasil Survey Lapangan Tahun,2014

Dari tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa 46,7% dari responden sudah menerima informasi perda lebih dari 3 kali, 28,0% menerima informasi tersebut antara 1-2 kali, sementara sebagian responden belum menerima informasi perda 25,3% atau 46 orang yang belum mengetahui adanya informasi tersebut.

Sitti Fatimah, Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka intensitas perolehan informasi perda yang diperoleh lebih dari 3 kali dan 1-2 kali secara umum tidak pada satu media saja. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey lapangan yang ternyata ada 17 (9,3%) menerimanya lebih dari satu media (pemda dan mass media), 16 (8,8%) informasi yang diterima melalui penyuluhan, 73 (40,1%) memperolehnya dari mass media saja, 30 (16,5%) mendapat informasi tersebut dari sumber lain, dan 46 (25,3%) belum pernah mendapatkan informasi perda tersebut. Untuk jelasnya mengenai hal ini terdapat dalam tabel 8 berikut.

Tabel 2
Distribusi Responden Menurut Media Perolehan Informasi
Yang Disosialisasikan

Jenis Media	Frekuensi	Persentase
Penyuluhan/ Mass Media	17	9.3
Penyuluhan saja	16	8.8
Mass Media saja	73	40.1
Sumber Lain	30	16.5
Tidak Pernah	46	25.3
Jumlah	182	100

Sumber : Hasil Survey Lapangan Tahun, 2014

Tabel 2 tersebut di atas memperlihatkan bahwa informasi yang diterima masyarakat sangat bervariasi. Pesan yang disampaikan lewat mass media dan penyuluhan lokasi sangat mempengaruhi, disisi lain pesan yang disampaikan melalui forum (penyuluhan) lebih efektif dari pesan melalui mass media. (Mubyarto & Kartodirdjo.S, 164 : 1988).

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa responden yang menerima informasi melalui media masa saja maupun dari sumber lain menyatakan kurang memahami maksud dan tujuan dari rencana penataan ruang yang dilaksanakan, dan yang paling mendapat respon adalah pelayanan penyuluhan yang dapat memberi informasi secara tepat kepada masyarakat, sosialisasi melalui penyuluhan serta media masa juga sangat efektif jika dilakukan dengan baik. Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang kawasan wisata bahari, maka informasi melalui penyuluhan sangat besar pengaruhnya untuk memotivasi minat/perhatian masyarakat terhadap peraturan tersebut.

3. Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari

Peran serta masyarakat merupakan suatu usaha untuk menggerakkan masyarakat agar mereka ikut terlibat baik secara mental maupun emosional untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama. Demikian pula halnya dengan upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan kawasan wisata, apabila lingkungan kawasan wisata dapat terpelihara dan senantiasa dalam kondisi baik/bermanfaat sesuai yang diinginkan, maka harus didukung oleh adanya peran serta dari masyarakat.

Dalam penelitian ini peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan kawasan wisata di Kecamatan Nusaniwe dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu: kontribusi kelembagaan/organisasi, kesediaan dalam menjalankan aturan, dan pemeliharaan lingkungan wisata. Dalam hal ini aktivitasnya dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria, yaitu: baik dengan bobot tiga, cukup baik dengan bobot dua dan kurang baik dengan perolehan bobotnya satu.

a. Kontribusi Kelembagaan/Organisasi

Aktivitas organisasi mencerminkan adanya peran serta masyarakat yang berupaya untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi secara bersama-sama atau untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam perbaikan dan pemeliharaan lingkungan kawasan wisata. Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai sejauhmana aktivitas organisasi yang diikuti masyarakat di Kecamatan Nusaniwe, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Penilaian Peran Serta Masyarakat Terhadap Kontribusi Kelembagaan/Organisasi

No.	Kulifikasi	Kontribusi Kelembagaan/ Organisasi			Jumlah	
		Bobot 1	Bobot 2	Bobot 3	%	Skor
		F	F	F		
1.	Baik	-	-	48	26,4	0,79
2.	Cukup baik	-	109	-	59,9	1,19
3.	Kurang baik	25	-	-	13,7	0,13
Jumlah		25	109	48	100	2,11

Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun,2014

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang memberi pernyataan bahwa peran serta masyarakat dalam berorganisasi yang memiliki aktivitas (baik) sebanyak 48 orang atau 26,4%, (cukup baik) sebanyak 109 orang atau 59,9%, dan yang menjawab (kurang baik) sebanyak 25 orang atau 13,7%. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa, warga masyarakat Kecamatan Nusaniwe lebih condong aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi dalam penataan ruang kawasan wisata bahari. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas, dimana sebanyak 59,9%/109 orang dengan skor rata-rata 2,11 dari masyarakat yang menyatakan (cukup baik). Alasan dari masyarakat, dengan dibekali ketrampilan di bidang pariwisata, maka mereka akan lebih percaya diri di dalam pengelolaan.

b. Menjalankan aturan yang ditetapkan

Program pemerintah dalam mengatasi masalah perbaikan lingkungan kawasan wisata bahari sangat diperlukan oleh masyarakat, guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dan mampu memberikan manfaat atau keuntungan yang besar bagi masyarakat. Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai program pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan Nusaniwe, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Penilaian Peran Serta Masyarakat Terhadap aturan yang ditetapkan

No.	Kulifikasi	menjalankan aturan yang ditetapkan			Jumlah	
		Bobot 1	Bobot 2	Bobot 3	%	Skor
		F	F	F		
1.	Baik	-	-	45	24,7	0,74
2.	Cukup baik	-	105	-	57,7	1,15
3.	Kurang baik	32	-	-	17,6	0,17
Jumlah		32	105	45	100	2,06

Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun,2014

Sitti Fatimah, Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang memberi penilaian bahwa program pemerintah yang dilaksanakan sangat (baik) sebanyak 45 orang atau 24,7%, (cukup baik) sebanyak 105 orang atau 57,7%, dan yang (kurang baik) sebanyak 32 orang atau 17,6%.

Menyikapi pernyataan tentang penilaian peran serta masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan diatas, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Nusaniwe menyambut positif terhadap program pemerintah. Hal ini terlihat dalam tabel bahwa dari keseluruhan responden, sebanyak 57,7% dengan skor rata-rata 2,06 masyarakat menjawab (cukup baik). Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat mendukung pengembangan wisata bahari di daerahnya.

c. Pemeliharaan Lingkungan Wisata

Pemeliharaan lingkungan wisata tidak terbatas pada kawasan objek wisata yang harus permanen, namun yang lebih penting adalah memenuhi persyaratan kesehatan, dimanakondisi kawasan objek wisata bersih, tertata rapi, memiliki sarana/prasarana lingkungan yang memadai, kondisi lingkungan sekitar kawasan objek wisata yang sehat dan sebagainya. Selain itu, sikap masyarakat harus dapat memahami arti pentingnya lingkungan kawasan objek wisata yang sehat, serta bagaimana menyikapi permasalahan yang timbul dalam lingkungan kawasan objek wisata. Hal ini tentunya dilandasi oleh pengetahuan dan kesadaran. Untuk jelasnya persepsi masyarakat tentang pemeliharaan lingkungan wisata bahari dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5
Penilaian Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemeliharaan Lingkungan Wisata

No.	Kulifikasi	Pemeliharaan Lingkungan Wisata			Jumlah	
		Bobot 1	Bobot 2	Bobot 3	%	Skor
		F	F	F		
1.	Baik	-	-	20	11,0	0,32
2.	Cukup baik	-	79	-	43,4	0,86
3.	Kurang baik	83	-	-	45,6	0,45
Jumlah		83	79	20	100	1,63

Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun,2014

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden yang memberi penilaian bahwa pemeliharaan lingkungan wisata yang dilaksanakan sangat (baik) sebanyak 20 orang atau 11,0%, (cukup baik) sebanyak 79 orang atau 43,4%, dan yang (kurang baik) sebanyak 83 orang atau 17,6%.

Dari Tabel 14 terlihat bahwa sifat masyarakat terhadap lingkungan wisata memuaskan. Hal ini terlihat dengan tanggapan responden sebanyak 79 responden (bobot 2) cukup baik dengan skor rata-rata 1,63 menjawab sifat masyarakat terhadap lingkungan cukup baik. Ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan wawasan masyarakat untuk mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan sudah sangat bagus. Jika hal ini dibiarkan maka akan berdampak pada keberlangsungan obyek wisata khususnya wisata bahari. Keadaan ini akan

berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan yang berimbas pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Analisis Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari

Faktor-faktor tersebut di atas dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian variabel yaitu variabel bebas X_1 yang terdiri dari Tingkat Pendidikan, X_2 Tingkat Pendapatan, X_3 Status Tempat Tinggal, dan X_4 Sosialisasi Perda. Sedangkan variabel terikatnya (Y_1) adalah Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari.

a. Analisis Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator analisis yaitu dalam hubungan variabel X_1 (tingkat pendidikan) dengan variabel Y_1 (peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan wisata bahari) adalah semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka kesadaran dan kesediaan untuk berperan serta akan semakin tinggi pula. Kesadaran dan kesediaan masyarakat tersebut menjadi poin penting bagi pemerintah dalam penjabaran materi-materi penataan ruang kawasan wisata bahari yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.

Tabel 6

Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari

No.	Tingkat Partisipasi	Tingkat Pendidikan			Jumlah	
		SD/SLTP	SLTA	PT	F	%
		F	F	F		
1.	Tinggi	-	13	21	34	18,69
2.	Sedang	-	53	-	53	29,12
3.	Rendah	74	21	-	95	52,19
Jumlah		74	87	21	182	100

Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun,2014

b. Analisis Hubungan antara Tingkat Pendapatan (X_2) dengan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari

Tingkat pendapatan masyarakat secara umum tidak menentukan kualitas dari peran serta masyarakat terhadap penataan ruang kawasan wisata bahari. Hal ini dikarenakan baik masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi maupun yang berpendapatan rendah mempunyai motivasi yang sama untuk turut terlibat dalam proses penataan ruang terutama dalam lingkungan sekitarnya, namun bentuk peran serta yang diwujudkan tentunya berbeda sesuai dengan pola hidup masing-masing. Kepedulian terhadap perkembangan lingkungannya termasuk keinginan untuk terlibat dalam proses penataan ruang yang dilakukan.

Tabel 7

Hubungan Tingkat Pendapatan (X_2) dengan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari

No	Tingkat Partisipasi	Tingkat Pendapatan			Jumlah	
		≤ 750.000	1.000.000-1.415.000	$\geq 1.415.000$		
		F	F	F	F	%
1.	Tinggi	1	2	31	34	18,68
2.	Sedang	13	40	-	53	29,12
3.	Rendah	78	17	-	95	52,19
Jumlah		92	59	31	182	100

Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun, 2014

Hasil analisis Chi-kuadrat menunjukkan adanya pengaruh antara tingkat pendapatan dengan peran serta masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Wisata Bahari yaitu X_2 hitung sebesar 219,79 lebih besar dari X tabel 9,488 pada derajat bebas (Db) = 4 yang taraf kepercayaannya sebesar 0,05 yang menyatakan H_0 ditolak. Hasil analisis ini menyatakan bahwa antara tingkat pendapat dengan peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan wisata bahari terdapat hubungan yang saling berpengaruh. Adapun hasil perhitungan konversi kualitatif dengan menggunakan uji koefisien kontingensi untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan tersebut adalah 0,73 yang artinya hubungan tersebut *Kuat*.

c. Analisis Hubungan antara Status Tempat Tinggal (X_3) dengan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari

Status tempat tinggal merupakan salah satu alasan yang cukup mendasar untuk masyarakat dalam keterlibatannya pada program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan dalam penataan ruang kawasan wisata bahari juga sangat dipengaruhi oleh status tempat tinggal. Lebih besar masyarakat yang memiliki tempat tinggal sendiri maka kecenderungan untuk berperan serta dalam penataan ruang kawasan wisata baharipun semakin besar kemungkinannya. Adanya asumsi seperti ini tidaklah berlebihan, hal ini disebabkan karena dengan kepemilikan tempat tinggal sendiri maka peluang untuk turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan penataan ruang dapat diwujudkan dengan kesediaan untuk memberikan sebagian lahannya bagi kepentingan pembangunan guna terwujudnya suatu lingkungan yang teratur dan dinamis serta relevan mengikuti perkembangan pembangunan kawasan wisata.

Tabel 8

Hubungan Status Tempat Tinggal dengan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari

No	Tingkat Partisipasi	Status Tempat Tinggal			Jumlah	
		Milik Sendiri	Sewa/kontrak	Tanah Negara/Adat		
		F	F	F	F	%
1.	Tinggi	10	1	23	34	18,68

Sitti Fatimah, Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

2.	Sedang	30	23	-	53	29,12
3.	Rendah	81	8	6	95	52,19
Jumlah		121	32	29	182	100

Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun,2014

Hasil analisis yang diperoleh menyatakan adanya pengaruh antara status tempat tinggal dengan peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan wisata bahari yaitu Chi-kuadrat X^2 hitung 112,69 lebih besar dari X tabel 9,488 dengan taraf kepercayaan 0,05 pada derajat bebas (Db) = 4 yang menyatakan H_0 ditolak. Adapun hasil perhitungan koefisien kontingensi untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan tersebut adalah 0,61 sesuai dengan Indeks Kuatnya Hubungan (IKH) yang artinya hubungan tersebut **Kuat**.

Dari analisis yang dilakukan terhadap variabel status tempat tinggal di atas, maka hasil yang diperoleh ada kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan wisata bahari, maka ada hubungan yang saling berpengaruh antara kedua indikator tersebut. Adanya hubungan tersebut menunjukkan kondisi dimana masyarakat dengan sengaja turut berperan serta dalam penataan ruang lingkungan (kawasan wisata) di sekitarnya yang diwujudkan dalam bentuk kesediaannya untuk memberikan atau merelakan kepentingan pribadinya guna mendukung proses penataan ruang kawasan yang dilakukan.

d. Analisis Hubungan Antara Sosialisasi (X_4) Perda Pariwisata dengan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari

Identifikasi mengenai Perda Pariwisata yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan asumsi bahwa semakin tinggi dan berkualitas sosialisasi yang diadakan dan diikuti dengan penegakan tindakan hukum bagi pelanggar dapat memotivasi keterlibatan masyarakat dalam proses penataan ruang kawasan wisata yang akan dilaksanakan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, pada Bab VI Pasal 65 yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang Usaha Pariwisata diuraikan bahwa peran serta masyarakat dalam rencana pengembangan usaha pariwisata diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap pengembangan informasi potensi dan masalah serta rencana pengembangan usaha pariwisata.

Tabel 9

Hubungan Sosialisasi Perda dengan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari

No	Tingkat Partisipasi	Sosialisasi Perda			Jumlah	
		≥ 3 Kali	1-2 Kali	Belum Pernah	F	%
1.	Tinggi	33	1	-	34	18,68
2.	Sedang	39	14	-	53	29,12
3.	Rendah	13	36	46	95	52,19
Jumlah		85	51	46	182	100

Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun,2014

Pada perhitungan Chi-kuadrat diperoleh hasil yang menyatakan bahwa antara sosialisasi perda dengan peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan wisata bahari memiliki pengaruh sebesar X^2 hitung 101,87 lebih besar dari X tabel 9,488 pada derajat bebas (Db) = 4 yang taraf kepercayaannya sebesar 0,05. Hasil analisis ini menyatakan H_0 ditolak dengan kata lain antara sosialisasi dengan peran serta masyarakat terdapat hubungan yang saling berpengaruh, yang kemudian didukung dengan hasil perhitungan koefisien kontingensi yang menyatakan hubungan tersebut *Sedang* atau 0,59 pada konversi Indeks Kuatnya Hubungan (IKH). Sesuai dengan asumsi yang dikemukakan di atas, maka jelaslah bahwa apabila intensitas penyebaran informasi (sosialisasi) Perda mengenai penataan ruang kawasan wisata bahari yang dilakukan dengan tingkat kualitas yang tinggi akan mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat terhadap proses penataan ruang yang dilakukan.

5. Faktor-faktor Strategus Internal dan Eksnternal

Dari faktor internal dan eksternal yang ada di atas bisa di lakukan pembobotan untuk mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan peran masyarakat.

Pemberian bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 100). Sedangkan untuk pemberian ranting untuk masing-masing factor, dari 4 (sangat kuat) sampai 1 (tidak kuat/lemah), berdasarkan pengaruh factor tersebut terhadap Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan dan peluang) diberi nilai mula dari +1 sampai dengan +4sangat baik. Sedangkan Variabel yang bersifat negative, kebalikanya (kelemahan dan ancaman).

Dari hasil Analisis Internal dan Eksternal yang tertuang dalam grafik letakkuadran maka strategi WT merupakan strategi yang dianggap memiliki prioritas yang tinggi dan mendesak untuk dilaksanakan. Strategi tersebut adalah :

1. Memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka dalam posisi sebagai partnerpemerintah yang berkontribusi dalam penataan ruang.
2. Mengaktifkan peran masyarakat bukan hanya sebagai objek kebijakan pemerintah, serta pemerintahan yang akuntabel, transparan dan responsif terhadap keberadaan masyarakat sebagai subyek aktif yang juga menentukan kebijakan.

E. KESIMPULAN

1. Dari ke empat aspek yang diteliti, yang mempunyai tingkatan pengaruh yang *Kuat* terhadap peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan wisata bahari adalah pendidikan, tingkat pendapatan, status tempat tinggal dan aspek sosialisasi mempunyai pengaruh yang *Sedang*.

Sitti Fatimah, Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

2. Adapun strategi yang di lakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan wisata bahari yaitu :
 - a. Strategi S-O
 - 1) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan hak, kewajiban, dan peranannya dalam proses peruntukan dan pembangunan ruang, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab yang kuat terhadap hasil-hasilnya.
 - 2) Membina kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penataan ruang kawasan.
 - b. Strategi W-O
 - 1) Melakukan perencanaan yang benar-benar konsekuen sehingga perencanaan yang di buat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat.
 - 2) Mengoptimalkan potensi yang dimiliki masyarakat untuk terlibat langsung berkenaan dengan pelaksanaan penataan ruang.
 - c. Strategi W-T
 - 1) Memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka dalam posisi sebagai partner pemerintah yang berkontribusi dalam penataan ruang.
 - 2) Mengaktifkan peran masyarakat bukan hanya sebagai objek kebijakan pemerintah, serta pemerintahan yang akuntabel, transparan dan responsif terhadap keberadaan masyarakat sebagai subyek aktif yang juga menentukan kebijakan.
 - d. Strategi S-T
 - 1) Melibatkan masyarakat dalam penyusunan penataan ruang yang merupakan hasil dan kesepakatan bersama, hasil dari dialog serta negosiasi berbagai pihak yang terlihat ataupun pihak yang terkena dalam dampak perencanaan.
 - 2) Meningkatkan komitmen dan konsistensi berbagai pihak terkait dalam produk penataan ruang.

Dari hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang berpengaruh menurut perubahan fisik spasial kota terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah letak keberadaan kampus, meningkatnya harga lahan, dan berkembangnya bangunan-bangunan komersial dan perumahan di Kawasan Pendidikan Samata-Bontomarannu, adapun faktor yang sangat berpengaruh menurut perubahan fisik spasial kota terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat adalah pengaruh kualitas pendidikan, kesehatan, dan agama di masyarakat.

Perubahan-perubahan tersebut ditandai dengan munculnya berbagai aktivitas perdagangan dan jasa lainnya yang tumbuh di sekitar jaringan jalan utama terutama yang berada dekat dari kampus atau dekat dengan tempat tinggal mahasiswa, serta bangunan rumah kos yang semakin banyak bermunculan di daerah permukiman yang dekat dengan kampus atau daerah pengembangan yang masih kosong di sekitar kampus. fungsi lahan dari suasana pertanian menjadi aktifitas kegiatan perkotaan pendukung kawasan pendidikan. Adapun pengaruh sosial terhadap pendidikan yaitu warga lebih termotivasi khususnya anak-anak untuk bersekolah maupun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan alasan letak tempat tinggal dengan universitas yang lebih dekat. Selain itu, pengaruhnya terhadap agama yaitu warga termotivasi untuk mendatangi mesjid-mesjid

Sitti Fatimah, Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

setempat. Seperti beberapa mahasiswa yang memberikan bimbingan mengaji maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Adapun pengaruhnya terhadap kesehatan dan lain-lain.

Daftar Pustaka

1999. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tentang Peranan Masyarakat Sebagai Pelaku Utama dalam Pembangunan.
2007. Undang-Undang Nomor. 26 pada Bab VIII Pasal 60 s/d 66, tentang Penataan Ruang.
2010. PP No. 69, tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
2013. S.K Gubernur Maluku No. 250, tentang penetapan besarnya Upah Minimum Propinsi (UMP).
2004. Undang-Undang Nomor. 32 Bab VII Pasal 150, tentang Pemerinta Daerah.
2011. Perda Kota Ambon No. 4, Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
2006. Perda Kota Ambon No. 2, tentang Perubahan Status Kota Ambon.
2009. Undang-Undang No. 10, tentang Kepariwisataaan.
1965. PP No. 9, tentang tentang wisatawan.
- Ardika, 2000. Beberapa Pokok Pikiran Tentang Pengembangan Wisata Bahari di Bali. Naskah Lengkap Seminar Nasional. Denpasar: Universitas Udayana.
- Budiman, 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, PT. Gramedia Pustakan Utama.
- Gusti Bagus, 2009. Konsep Pariwisata Kajian Sosoilogi dan Ekonomi. Laporan Tugas Akhir Program Studi Pariwisata, Universitas Udayana.
- Maria M,L, 2000. "Peran Serta Masyarakat dalam Pengurusan IMB di Kota Kupang", Skripsi tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Moenir, 1998. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara.
- Ndraha, 1987. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta : PT Bina Aksara Jakarta.
- James J. Spillance, 1985. Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan prospeknya. Yogyakarta : Kanisius.
- Kartodirdjo, S. 1988. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 : dari Imporium sampai Imperium, Jilid I/ Sartono Kartodirdjo. Jakarta : Gramedia
- Keraf, 2000. Dimensi Budaya Ekologi Pesisir Dalam Pengembangan Wisata Bahari. Naskah Seminar, Denpasar Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Pendit, Nyoman S. 2003. Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta. Pradnya Pramita.
- Pendit, Nyoman S. 2006. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2000. Pengantar umum psikologi. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Santoso, Singgih. 2004. SPSS Statistika Multivariat, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sastropetro, 1986. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung : Alumni.
- Siagian, 2000. Metode Statistika Untuk Bisnis Dan Ekonomi Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Siti Nuraisyah, 1998. Pengertian Wisata Bahari
- Spillane, James.1985. Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan prospeknya.Yogyakarta: Kanisius

Sitti Fatimah, Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

- Soekadijo, R.G. 1996. Anatomi Pariwisata, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Tjokromidjojo, Bintoro, 1985. Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3S, Jakarta
- Yoeti, Oka A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa.
- Wahab, Salah. 1989. Manajemen Pariwisata, Jakarta : Pradya Paramita.

Sitti Fatimah, Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon